SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 147 /KPTS/03/2024

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/3/KPTS/03/2024 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaraan 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/147/KPTS/03/2024
TANGGAL: 4 maret 2024

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
2	Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
3	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4	Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	
5	Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa	
6	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Liwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Kajian Resiko Bencana	
9	Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
10	Jalan Umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
11	Rencana Induk *Geopark* Kaldera Suoh	Balitbang
12	Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13	Pedoman Cadangan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Bencana	Dinas Ketahanan Pangan
14	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Nutrisi Lansia	Dinas Sosial
15	Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	
16	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi RSUD Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar
17	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	
18	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Palayanan Pasar	Dinas Koperasi Ukm
19	Penyediaan Seragam Gratis	Dinas Pendidikan
20	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
21	Beasiswa Pendidikan Seni	
22	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	
23	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	
24	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	

25	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
26	Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	
27	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas	
28	Perubahan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai	
29	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	
30	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	
31	Besaran NJOP dan NJOPTKP	
32	Nilai Sewa Reklame	
33	Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah	
34	Tata Cara Pengelolaan PBB-P2	
35	Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Reklame	
36	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	
37	Tata Cara Pengelolaan PBJT	
38	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	
39	Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet	
40	Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	
41	Sistem dan Prosedur Pengelolaan BPHTB	
42	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB	
43	Kartu Kredit Pemerintah Daerah	
44	Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	
45	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
46	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	
47	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026	
48	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	
49	Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak	Dinas KBPP dan PA
50	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BKP SDM
51	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah	
52	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuian Ijazah Kenaikan Pangkat	
53	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024	Dinas PMP
54	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2024	
55	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025	
56	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
57	Pedoman Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa	

58	Peratin	
59	Pemilihan Peratin	
60	Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Dalam Pembangunan Pekon	
61	Peta Jalan (*Road Map)* Peran dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan Tahun 2023-2028	DLH
62	Pedoman Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024	inspektorat
63	Pedoman Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah Tahun 2024	
64	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	
65	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
66	Pedoman Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
67	Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan	Bagian Organisasi
68	Pedoman Pengangkatan Komisi dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri	Bagian Perekonomian
69	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008